



DEWANPERS

Etika

Menjaga dan Melindungi **Kemerdekaan Pers**



Ketua Dewan Pers, Bagir Manan **Kemerdekaan Pers Bukan Tanpa Batas**



Pers adalah Mata, Telinga dan Mulut Bangsa



Sekilas Berita HPN 2015

Ketua Dewan Pers, Bagir Manan Kemerdekaan Pers Bukan Tanpa Batas

Kalangan pers hendaknya lebih mengarahkan diri kepada persoalan ketaatan pada kode etik, peningkatan profesionalisme dan tradisi demokratis.

Keberadaan kemerdekaan pers sangat esensial di negara demokrasi. Pada tahun 1999, saat para jurnalis dan penggiat demokrasi berjuang agar kemerdekaan pers diperkuat dalam undang-undang (UU No. 40/1999 tentang Pers), hal itu dilakukan bukan karena dorongan euforia reformasi, melainkan untuk mewujudkan kemerdekaan pers sebagai hal yang sangat asasi dalam negara demokrasi.

Demikian dikatakan oleh Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, di Jakarta, terkait Hari Pers Nasional 9 Februari 2015.

Bagir Manan menambahkan, kemerdekaan pers bukan kemerdekaan tanpa batas. Jangan sampai kemerdekaan digunakan dengan merusak tatanan demokrasi.

“Perlu diingat, demokrasi bisa rusak kalau orang hanya melihat kebebasannya, sehingga menyulut anarkisme yang merupakan musuh demokrasi. Karena itu pembatasan diperlukan”, katanya.

Menurutnya, setidaknya ada empat hal untuk membatasi kemerdekaan. *Pertama*, hukum atau undang-undang. Pembatasan itu harus diatur oleh hukum bukan oleh kebijakan atau dekresi, karena menyangkut hak asasi manusia.

Kedua, etika profesi. Di internal



komunitas pers, cara membatasi kemerdekaan sendiri adalah dengan lebih taat kepada kode etik yang disepakati bersama. Jurnalis merupakan profesi, maka kode etik harus menjadi mahkota profesi itu.

Ketiga, kepentingan publik. Hukum profesionalisme adalah harus *client oriented*. Klien pers tidak lain yaitu publik. Karena itu, jika perusahaan pers ingin sehat dan profesional, yang pertama dan utama untuk dilakukan yaitu harus berpihak dan membela kepentingan publik.

Keempat, pers harus taat kepada tradisi-tradisi pers bebas yang universal di alam demokrasi. “Masalah keberimbangan dalam pemberitaan, misalnya, seandainya tidak diatur dalam undang-undang sekalipun, mesti dipedomani karena merupakan tradisi dalam hidup berdemokrasi”, ujarnya.

Mantan Ketua Mahkamah Agung ini menambahkan, ketaatan terhadap perangkat di luar undang-undang, seperti kode etik, profesionalisme dan tradisi

demokratis, semestinya lebih baik ketimbang pada undang-undang.

“Hal itu merupakan wujud tanggung jawab pers terhadap kemerdekaan yang dimilikinya”, tuturnya seraya menambahkan di negara demokrasi sekalipun, undang-undang dibuat melalui proses politik dimana kehendak mayoritas lebih dominan, sehingga undang-undang yang dihasilkan lebih cenderung dimenangi kaum kapital, tidak terkecuali di bidang pers. Itu sebabnya, ketaatan terhadap hal-hal di luar undang-undang seharusnya jauh lebih bagus.

Belum Kukuh

Lebih jauh, guru besar ilmu hukum ini menjelaskan, komunitas pers dan masyarakat bangsa ini baru menyadari pentingnya kode etik, profesionalisme dan tradisi-tradisi berdemokrasi. Selama bertahun-tahun, perbincangan mengenai hal-hal itu hilang akibat pemerintahan otoriter. Kesadaran mengenai kode etik, profesionalisme dan tradisi-



tradisi berdemokrasi itu belum kuat, sehingga diperlukan undang-undang sebagai penguat.

“Undang-undang yang membatasi kebebasan sebetulnya tidak kita inginkan. tetapi terpaksa kita terima. Ada yang mengatakan lebih baik kita menerima sesuatu yang jelek karena kita belum memiliki sesuatu yang baik”, ujarnya.

Hukum atau undang-undang kita perlukan karena akan terus menerus mendorong kehidupan ini menjadi lebih tertib. Hukum merupakan langkah kedua dalam

kehidupan agar kita menjadi semakin baik.

Sebenarnya UU dibuat antara lain untuk “mengkrangkeng” penguasa agar tidak menggunakan kekuasaannya secara semena-mena. Para pejuang demokrasi membuat Undang-Undang Pers yang berisikan kemerdekaan pers sejatinya untuk mengembalikan kemerdekaan yang selama bertahun-tahun dirampas oleh penguasa.

Memang harus diakui, lanjut Bagir Manan, Undang-Undang Pers masih mengandung kekurangan. Meskipun demikian, perlu

pertimbangan matang jika ingin mengubah UU tersebut. Perubahan sebuah UU, suka tidak suka, melalui proses politik. Bukan tidak mungkin perubahan UU tersebut justru akan menjadi lebih buruk dari sebelumnya.

Karena itu, selain memberi perhatian pada persoalan hukum, kalangan pers hendaknya mengarahkan diri dengan memberi perhatian besar pada persoalan ketaatan terhadap kode etik, peningkatan profesionalisme dan tradisi demokratis. (red)

Wartawan Ibarat Lebah

Saat menyampaikan sambutan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Batam, 9 Februari 2015, Ketua Dewan Pers, Bagir Manan, menyampaikan cerita mengenai laba-laba, semut dan lebah. Cerita itu dikutip dari filosof Inggris, Francis Bacon.

Bagir Manan bercerita, ketika berbicara mengenai cara memajukan ilmu, Bacon mengambil tamsil kehidupan laba-laba, semut, dan lebah. Laba-laba membuat sarang yang bergelantung di udara dari air liur yang diproduksi dari tubuhnya sendiri. Laba-laba ketika membuat sarang sama sekali tidak memanfaatkan material sekitarnya, karena hanya menggunakan air liurnya sendiri dan semata-mata untuk dirinya sendirinya. Laba-laba tidak membuat suatu kemajuan atau perubahan apapun. Memang tidak merugikan pihak lain, tetapi juga tidak memberi manfaat pada pihak lain.

Bagaimana dengan semut? Semut kata Bacon, tidak pernah berhenti mengangkut berbagai material. Tetapi semut hanya sekedar mengangkut dan mengumpulkan, tanpa mengubah bahan-bahan tersebut agar memberi manfaat lebih lanjut. Barangkali satu-satunya pelajaran dari kerja semut adalah mereka selalu bekerja atas dasar gotong royong, atas dasar kebersamaan.

Selanjutnya, bagaimana dengan lebah? Lebah kata Bacon, tidak hanya bersama-

sama mengumpulkan bahan-bahan atau sari bunga, tetapi mencernanya dan mengubah bahan-bahan itu menjadi madu. Hasil kerja lebah tidak hanya bermanfaat bagi kehidupan lebah itu sendiri, melainkan bagi makhluk lain, terutama manusia. Selain itu, meskipun seperti semut senantiasa hidup bersama, tetapi masing-masing lebah bekerja menemukan bunga untuk dihisap sarinya dan dibawa ke sarang untuk diolah menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kepentingan bersama atau makhluk lain.

Bagir Manan melanjutkan, agar apa yang dilakukan oleh pers menjadi sesuatu yang maslahat, semestinya tidak seperti semut yang sekedar memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain. Pekerjaan itu harus diolah, dicerna dan ditransformasikan sehingga memberi sebesar-besarnya manfaat. Dalam konteks rakyat Indonesia, manfaat itu adalah sebesar-besarnya kemakmuran bagi sebanyak-banyaknya rakyat.

Abal-abal

Di dalam sambutannya, Ketua Dewan Pers juga menyampaikan sejumlah persoalan internal pers. *Pertama*, persoalan mengenai cara-cara menterjemahkan hak atas kebebasan berekspresi yang pada gilirannya menghadirkan keberpihakan. Menjadi persoalan, ketika keberpihakan itu bersifat partisan. Partisanship pers

meskipun sulit dicegah, tetapi tetap dianggap tidak begitu layak. Dalam alam demokrasi, keberpihakan pers semestinya keberpihakan kepada publik, bukan terhadap kekuatan politik atau aliran politik tertentu.

Kedua, pengaruh pemilik terhadap pers. Selain kemungkinan terlalu mengkedepankan pers sebagai usaha ekonomi, pengaruh yang meresahkan publik, ketika pemilik menjadi pelaku atau aktivis politik, kekuatan politik tertentu. Ini merupakan faktor paling utama yang menimbulkan partisanship pers.

Ketiga, persoalan “pers abal-abal”. Sesuatu yang semestinya tidak boleh ditolerir oleh kalangan pers sendiri. Menurut Bagir Manan, Dewan Pers menerima begitu banyak keluhan terhadap tingkah laku atau praktek pers abal-abal. Yang lebih memprihatinkan, tingkah laku abal-abal tidak hanya ada di pers yang memang abal-abal, tetapi dapat juga menghinggapi pers yang secara normatif memenuhi syarat-syarat sebagai pers tetapi bertingkah laku abal-abal.

Karena itu, ia meminta peserta HPN menegaskan pendirian menolak segala bentuk pers abal-abal dan menindak segala bentuk dan jenis pers abal-abal. (red)



Pers adalah Mata, Telinga dan Mulut Bangsa



yang baik harus disampaikan sebagai berita baik, begitupun sebaliknya. “Bad news is good news harus berubah menjadi good news is a good news. Pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pers yang memahami situasi. Tapi juga kalau tidak ada masalah, nanti tidak ada berita juga persnya. Jadi tak apalah, itu menjadi riak-riak di Indonesia,” selorohnya.

Ia menambahkan, bangsa Indonesia tidak mau kembali ke masa pers tahun 80-90an yang dikontrol oleh penguasa. Karena itu, berita baik, katakan baik, berita buruk, katakan buruk. Pers adalah ruang perjuangan dan profesi.

Keberpihakan Pers

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pers Bagir Manan dalam sambutannya menegaskan, keberpihakan pers semestinya kepada publik bukan menempatkan diri sebagai bagian integral dari kekuatan-kekuatan politik yang bersaing.

“Cukup banyak persoalan pers, bagaimana cara menerjemahkan kebebasan dan hak berekspresi. Kebebasan pers semestinya keberpihakan pada publik, bukan pers partisan,” kata Bagir Manan.

Menurutnya, keberpihakan jadi masalah ketika pers menjadi partisan karena partisan tidak layak dalam pers bebas. “Pers partisan merendahkan diri sendiri, mengesampingkan kode etik, dan standar jurnalistik. Pengaruh politik terhadap pers meresahkan publik,” ujarnya. ([redaksi@detiknews/antaranews.com](mailto:redaksi@detiknews.com))

Wakil Presiden Jusuf Kalla hadir dalam puncak peringatan Hari Pers Nasional 2015 di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Senin (9/2/2015). Dalam pidatonya, Jusuf Kalla mengatakan, pers memiliki peran penting sebagai penyambung lidah bangsa.

“Selamat hari pers. Ini hari yang penting kita evaluasi dan melihat apa yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan. Pers penting, karena pers merupakan mata, telinga, sekaligus mulut suatu bangsa,” ujar JK.

Ia kembali meminta semua pihak untuk mengingat peran pers dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Walaupun politik Indonesia mengubah situasi bangsa, JK berharap hal tersebut tidak mengubah independensi pers sebagai mata dan telinga bangsa.

“Pada saat awal pers nasional, pers ikut memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Politik mengubah situasi, kadangkala

pers tergantung pada pemerintah maupun sebaiknya. Hal ini menjadi pertimbangan kita semua,” ungkapnya.

Menurutnya, selain situasi politik, perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap efisiensi pemberitaan yang sampai kepada masyarakat. “Teknologi mempengaruhi kita semua. Kalau dulu berita adalah sesuatu yang sudah terjadi, saat ini kita membaca dan melihat berita yang sedang terjadi. Begitu pesatnya perkembangan teknologi,” katanya.

Media haruslah objektif dan tentunya menguntungkan secara bisnis. “Apa yang dicanangkan, pers sehat, bangsa hebat, juga bisa sebaliknya. Pers sehat bermakna bahwa pers akan memberikan mata dan telinga yang objektif, dapat mempersatu bahkan memperenggang bangsa. Namun harapan kita adalah pers yang mempersatu bangsa,” tegas Jusuf Kalla.

Wapres berpesan, informasi



Sekilas Berita HPN 2015

HPN 2015 di Batam diisi tiga konvensi



“Tiga konvensi ini diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru bagi bangsa,” kata Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kepri Ramon Damora di Batam, Jumat.

Ramon mengatakan sengaja memilih tema yang terkini dan bersinggungan dengan Kepri dalam tiga konvensi itu.

Khusus untuk Konvensi Bahasa, HPN 2015 di Kepri ingin mengingatkan kembali asal usul Bahasa Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia, yaitu dari Tanah Melayu.... (12 Desember 2014 15:01 WIB | ANTARANews.com)

Batam - Hari Pers Nasional di Kepulauan Riau 2015 akan diisi tiga konvensi yaitu Konvensi Bahasa, Konvensi Perbatasan dan Kemaritiman dan Konvensi Masyarakat Ekonomi ASEAN.

HPN 2015, Pers Harus Gunakan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar



Tanjung Pinang - Salah satu tujuan digelarnya Konvensi Bahasa Indonesia dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2015 adalah agar wartawan di Indonesia lebih menyadari dan memiliki keterikatan yang lebih kuat sebagai pengguna Bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Pers Indonesia, Bagir Manan, saat menjadi pembicara dalam rangkaian kegiatan HPN 2015, Konvensi Bahasa HPN 2015 di Gedung Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jumat (6/2).

Menurutnya, peranan pers sangat penting untuk keberlangsungan Bahasa Indonesia disamping juga ikut memperkaya Bahasa Indonesia itu.

“Sehingga Bahasa Indonesia tidak sekedar sebagai lingua franca nusantara, tetapi juga sebagai sarana mempertinggi budaya, peradaban, dan kemajuan di segala bidang kehidupan kita,” kata Bagir. (Jumat, 06 Februari 2015 | www.beritasatu.com)

Ini Hasil Forum Pemred Di HPN 2015

Batam - Tidak ingin tertinggal dalam penyelenggaraan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai tahun 2015 ini, seluruh pemimpin redaksi (pemred) di negara ASEAN dan diprakarsai oleh Forum Pemred di Indonesia akan membentuk sebuah forum yang lebih besar untuk para pemred di negara ASEAN.

Hal tersebut berdasarkan diskusi dan dialog yang dilaksanakan oleh Forum Pemred pada Hari Pers Nasional (HPN) 2015 dengan mengundang sejumlah negara tetangga di ASEAN dalam pertemuan itu. Pertemuan yang dilaksanakan di Hotel Harmoni One, Batam, Kepulauan Riau, Sabtu (7/2) ini menghasilkan kesepakatan yang positif

untuk keberlangsungan pers di negara ASEAN.

Ketua Forum Pemred, Nurjaman Mochtar mengatakan, dibentuknya forum yang lebih besar tersebut adalah untuk meningkatkan jaringan antara para pemred di negara-negara ASEAN. Sebab, pers juga tidak ingin tertinggal oleh para pelaku-pelaku ekonomi dalam menghadapi MEA ini.

“Justru pertemuan ini, ketika secara ekonomi sudah tidak ada batas, maka para jurnalis dalam hal ini diwakili pemred jangan ketinggalan. Jangan sampai ekonomi sudah terbatas, jurnalis jangan ditinggal,” kata Nurjaman dalam acara tersebut. (Minggu, 8 Februari 2015 | sp.beritasatu.com)





Ketua Dewan Pers, Bgir Manan, menyampaikan sambutan pada acara Konvensi Bahasa Indonesia yang digelar di Pulau Penyengat (6/2/2015) dalam rangka HPN 2015.



Konvensi Media Massa HPN 2015 menghadirkan sejumlah menteri Kabinet Kerja sebagai narasumber.





Kegiatan Media Literasi di Batam dalam rangka HPN 2015.



Kegiatan Konvensi Bahasa Indonesia di Pulau Penyengat (6/2/2015) dalam rangka HPN 2015.



Anggota Dewan Pers, Ninok Leksono (kanan) dan Nezar Patria, menjadi pembicara talkshow di RRI dalam rangka HPN 2015.





Hari Pers Nasional 2015

Bagir Manan

Ada yang menamakan tahun 2014 (yang lalu): “tahun politik”. Ada dua peristiwa politik “besar” tahun 2014: “Pemilihan Umum Legislatif” dan “Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Ada pula yang menyebut dua peristiwa itu: “pesta demokrasi”.

Saya sengaja membubuhkan tanda kutip (“). Benarkah dua peristiwa itu adalah peristiwa besar? Benarkah dua peristiwa itu adalah tahun demokrasi?

Memang “besar” dalam makna keterlibatan berbagai *resources* yaitu keterlibatan rakyat banyak, baik rakyat dalam makna sebenarnya, keterlibatan besar-besaran semua pekerja politik, maupun para sukarelawan politik. Peristiwa itu juga besar, karena menelan biaya resmi dan tidak resmi, halal atau tidak halal dengan jumlah yang begitu menakjubkan.

Yang menarik, kehadiran peristiwa “besar” itu menghadirkan pula berbagai rangkaian kegaduhan, di luar urusan langsung dengan pemilihan umum tersebut, seperti “tandak-menandak” kekuatan-kekuatan politik dalam pembentukan undang-undang pemilihan kepala daerah (UU Pemilukada) antara pemilihan kepala daerah secara langsung atau melalui dewan perwakilan rakyat. Sungguh menakjubkan, empat hari sebelum habis masa kerjanya, dan

susunan DPR baru telah terbentuk (pemilihan umum dan anggota DPR baru telah disahkan KPU, walaupun belum mengucapkan sumpah), DPR lama masih memutus menyetujui RUU Pemilukada untuk disahkan menjadi undang-undang. Secara normatif tidak salah. Bagaimana dengan peradaban (etika) politik? Apakah perbuatan semacam ini termasuk yang dianjurkan sebagai wujud sopan santun politik? Tentu kita berharap, seluruh atau sebagian partai-partai politik dan anggota DPR, mengetahui dan menyadari perbuatan semacam itu bertalian dengan nilai etika politik. Pertanyaannya: “Mengapa tidak ada satupun kehendak untuk mempertimbangkannya?” Semua partai politik yang memiliki “wakil” di DPR dan para anggota DPR sendiri, memandang menyetujui RUU tersebut semata-mata sebagai bagian dari upaya meraih atau memperkuat kekuasaan. Kekuasaan adalah bintang pemandu dan dapat dicapai dengan menghalalkan segala cara (*the end justifies the means*). Yang lebih menakjubkan adalah sikap Pemerintah cq. Presiden (waktu itu) yang menyatakan *menolak* RUU yang sudah disetujui DPR. Menurut aturan main yang ada, tidak mungkin DPR menyetujui RUU tanpa ada “kesepakatan bersama” dengan Pemerintah. Menakjubkan pula, meskipun menyatakan menolak, Presiden mengesahkan

RUU tersebut menjadi undang-undang. Tetapi beberapa jam kemudian Presiden menetapkan Perpu yang membatalkan undang-undang yang baru disahkan itu. Sunggung-sungguh absurd. Yang lebih absurd, Presiden baru yang tidak menetapkan Perpu, bertanggung jawab untuk mempertahankan Perpu tersebut di hadapan DPR baru.

Bagaimana tahun politik ditinjau dari kaca mata “pesta demokrasi”? Sebagai suatu peristiwa, sebagai proses, pesta demokrasi telah berjalan dengan sukses. Partisipasi rakyat yang tinggi dan damai, selamanya menjadi ciri pemilihan umum di tanah air kita sejak pemilihan umum pertama 1955. Pertanyaannya: “Apakah Pemilu 2014 telah pula menunjukkan keberhasilan substantif (tidak semata-mata prosedural)?” Keberhasilan substantif, selain ada kebebasan memilih yang menyediakan alternatif pilihan, harus pula ditunjukkan dengan keberhasilan memilih orang-orang yang tidak sekedar sebagai aktivis lembaga politik, atau orang-orang yang duduk karena memiliki kemudahan (hubungan kekerabatan, hubungan kepentingan, atau memiliki modal), atau orang-orang yang sekedar pendulang suara (*vote getters*). Secara substantif pemilu berhasil, kalau yang duduk, memiliki pula orientasi kenegarawanan



(*statesmanship*) yang berkomitmen dan merasa sepenanggungan dengan rakyat banyak. Pesta demokrasi secara substantif berhasil apabila berhasil meningkatkan peradaban politik atau kualitas demokrasi pada umumnya. Sebagai suatu pesta demokrasi, Pemilu 2014 dengan segala turunannya masih didominasi oleh makna demokrasi prosedural, demokrasi sebagai proses, belum demokrasi dalam makna substantif. Demokrasi prosedural hanya mengkedepankan memaksimalkan partisipasi rakyat menuju kotak suara. Demokrasi prosedural hanya mengkedepankan mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya (untuk menjadi mayoritas). Kompetisi dalam demokrasi prosedural hanya soal “menang-menangan” (meminjam ungkapan alm. Bung Karno). Untuk mencapai hal tersebut, segala sesuatu dinilai dengan kepentingan politik, cq kepentingan politik kekuasaan. Serba politisasi (*politicking*).

Apa yang terjadi dengan pers selama tahun politik atau pesta demokrasi tersebut? Suatu saat, Presiden SBY mengutarakan ungkapan: “pers terbelah”. Terbelah bukan karena sekedar manifestasi “*the right of freedom of expression*” yang memungkinkan pluralisme pikiran dan pendapat (*pluralism of thought and opinion*). Beberapa pers kita menjadi pers “partisan”, karena menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. Salah satu hasil *partisanship* itu adalah pers-pers tersebut menjadi mesin dan melakukan berbagai *politicking*, bukan lagi sekedar dalam tataran hak berbeda pendapat (*the right to*



Beberapa pers kita menjadi pers “partisan”, karena menempatkan diri sebagai bagian integral kekuatan-kekuatan politik yang bersaing. Salah satu hasil *partisanship* itu adalah pers-pers tersebut menjadi mesin dan melakukan berbagai *politicking*



dissent), tetapi perbedaan yang tanpa disadari mengandung pendekatan konflik.

Pendekatan konflik adalah suatu pendekatan atas dasar “salah-benar”, karena itu lazim dikategorikan sebagai permainan di luar tatanan demokrasi bahkan bertentangan atau musuh demokrasi. Salah satu wujud pendekatan konflik adalah intoleransi dan bersifat “menghukum” kompetitor. Dalam doktrin, pendekatan konflik adalah hukum “lawan dan kawan”. Dapat dipastikan berbagai bentuk *partisanship* pers dalam tahun politik tahun lalu, belum dan tidak sampai pada ukuran “lawan dan kawan”. Kita pantas menghargai kesadaran itu. Namun, tingkah laku partisan itu sangat mengganggu tata nilai (*value*) yang terkandung dalam prinsip-prinsip (asas-asas) pers seperti prinsip independensi, prinsip menjunjung kode etik (*the most highly moral standard*) yang menjadi dasar tingkah laku kaum profesional, dan berbagai norma pers merdeka lainnya. Yang cukup merisaukan, sikap *partisanship* itu, tidak berhenti pada saat pesta demokrasi usai, melainkan berlanjut

hingga sekarang. Nampaknya, masih kuat pendirian, pesta demokrasi yang lebih diberi makna sebagai pesta politik itu belum usai. Dan *attitude* semacam itu tidak hanya ada pada pers yang bersikap *partisanship*, tetapi hampir seluruh pers.

Hal ini tidak dapat seluruhnya dibebankan di pundak pers. Berbagai kegaduhan dan konflik di badan-badan politik (intrastruktur dan suprastruktur) sangat mempengaruhi sikap dan pemberitaan pers. Walaupun pers independen, tetapi pers tidak berada di ruang kosong. Pers menjadi bagian dari berbagai interaksi seluruh aspek perikehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perikehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menunjukkan kebuntuan, ketidakjelasan arah, ada keterpisahan antara pengelola politik dan rakyat, penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*), atau sekurang-kurangnya perbuatan melampaui wewenang (*detournement de pouvoir*), dengan menggunakan pranata-pranata diskresi, atau pranata di luar



tatanan konstitusional UUD seperti bertindak atas dasar kekuasaan prerogatif, suatu pranata yang di negeri asalnya sendiri sangat dibatasi dan makin terbatas. Kekuasaan semacam itu merupakan peninggalan sistem sebelum ada demokrasi dan paham demokrasi. Atas dasar itu, seorang ilmuwan hukum kenamaan Inggris (Dicey) menyebut kekuasaan prerogatif sebagai “*the residual of discretionary or arbitrary authority*”.

Sumber “tension” lain yang dapat memicu persoalan dengan pers adalah tingkah laku pelaku-pelaku ekonomi yang hanya berorientasi pada memperoleh laba sebanyak-banyaknya. Ada pula yang menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut. Tiap tahun kita membaca hampir semua kegiatan ekonomi memberikan laba tahunan yang sangat besar. Laba besar itu lebih dimungkinkan karena memanfaatkan fasilitas negara seperti upah buruh yang rendah, keringanan-keringanan yang diberikan Pemerintah seperti *tax holiday*, pengurangan pajak bahkan pembebasan pajak. Tidak kalah penting, memanfaatkan birokrasi yang tidak sehat (*corrupted bureaucracy*) yang merajalela di setiap segmen administrasi negara, mulai dari tingkat tinggi sampai tingkat yang lebih rendah, termasuk pula memanfaatkan hubungan dengan kekuasaan. Privatisasi dan deregulasi yang dilakukan Pemerintah untuk mengurangi beban negara dan menghindari birokratisasi sama sekali tidak membuahkan kemaslahatan bagi rakyat banyak. Di negara-negara yang menjalankan privatisasi



Dimana pers ketika prinsip-prinsip (asas-asas) itu hanya berjalan sebelah? Pers, bukan saja sekedar menyaksikan berbagai kepincangan (*gap*), tetapi hidup dalam serba kepincangan



dan deregulasi, sama sekali tidak dirangsang dengan fasilitas negara, tetapi berorientasi penuh pada setinggi-tingginya efisiensi, meningkatkan kualitas hasil kerja, dan kualitas pelayanan publik. Inilah sumber laba mereka, bukan dengan memanfaatkan fasilitas negara, memanfaatkan birokrasi yang korup atau memanfaatkan bentuk-bentuk *spoil behavior* atau *spoil system* yang merugikan rakyat banyak.

Begitu pula usaha-usaha ekonomi yang diselenggarakan negara. Para pelaku ekonomi negara lebih menempatkan diri serupa dengan usaha ekonomi yang diselenggarakan oleh pelaku ekonomi bukan negara. Mereka melupakan bahwa fungsi ekonomi yang diselenggarakan negara bertujuan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang lebih memprihatinkan, badan-badan pengelola ekonomi negara dan badan-badan usaha negara, melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan seperti korupsi, dan berbagai tindakan yang merugikan kepentingan negara dan rakyat banyak, seperti kasus SKK Migas, Petral dan lain-lain.

Memperhatikan berbagai keadaan yang mau tidak mau akan berkorelasi dengan pers itu, dalam berbagai kesempatan saya mengingatkan agar berhati-hati menyebut “pers kebablasan”. Kita dapat mempersoalkan: “apakah

kebablasan itu sebab atau sekedar akibat”. Tentu saja, kebablasan menjadi sangat *intolerable*, apabila dilakukan dalam wujud *professional misconduct (unprofessional conduct)*, dengan sengaja tidak mengindahkan kode etik, tidak mengikuti standar-standar jurnalistik yang baku, atau menggunakan pers sekedar sebagai alat menekan untuk memperoleh keuntungan yang bertentangan dengan hukum.

Pada tanggal 15 Januari 2015 yang lalu di Jakarta, diadakan sarasehan pers yang diselenggarakan Dewan Pers. Sarasehan itu sangat kaya dengan pikiran-pikiran mendalam, baik mengenai peri kehidupan berbangsa dan bernegara, maupun mengenai pers sendiri. Di akhir sarasehan, disepakati sebuah deklarasi, baik yang bersifat sinyalemen keprihatinan maupun seruan-seruan kepada masyarakat pers maupun masyarakat pada umumnya. Salah satu sinyalemen adalah sebagai berikut:

“bahwa berkat nasionalisme yang menumbuhkan kesadaran dan kehendak bersatu, pada saat ini kita telah menjadi satu bangsa dan satu negara yang meliputi seluruh nusantara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

“bahwa pada saat ini, telah hidup dan berkembang tatanan demokrasi, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.”



Walaupun demikian, deklarasi juga mencatat, susunan Negara Kesatuan, demokrasi, negara hukum dan hak asasi manusia tersebut, masih terlalu mengkedepankan segi-segi politik nasionalisme, segi-segi politik demokrasi, segi-segi politik hak asasi, dan segi-segi formal negara hukum. Dalam banyak peristiwa dan perjalanan berbangsa dan bernegara, kita mengabaikan segi-segi sosial nasionalisme, segi-segi sosial demokrasi, segi-segi sosial negara hukum, segi-segi sosial hak asasi. Segi-segi sosial itu tidak lain dari kesejahteraan umum, dan keadilan sosial, sehingga kita mengenal sebutan *welfare nationalism*, demokrasi sosial atau demokrasi ekonomi (*politieke economische democratie*), negara hukum kesejahteraan (*welfare rule of law, verzorgingsstaat*), dan hak asasi manusia sosial (*subsistence rights, social mensenrechten*). Aspek-aspek sosial ini bukan sekedar kelengkapan atau instrumen, tetapi merupakan “*the other side of one coin*”. Nasionalisme yang sehat, demokrasi yang sehat, negara

hukum yang sehat, hak asasi yang sehat, hanya akan ada apabila segi-segi sosial sebagai “*the other side of the coin*” dilaksanakan sebagaimana mestinya bahkan mungkin mengkedepan.

Dimana pers ketika prinsip-prinsip (asas-asas) itu hanya berjalan sebelah? Pers, bukan saja sekedar menyaksikan berbagai kepincangan (*gap*), tetapi hidup dalam serba kepincangan itu. Kita hidup di tengah-tengah kemiskinan rakyat dan ketidakadilan yang merajalela. Sayangnya, bagian terbanyak pers kita ikut terbuai, bahkan menjadikan berbagai kepincangan itu sebagai peluang memperoleh kepuasan dalam suasana dan kenyataan serba terbelah itu. Pengertian pers sebagai sarana publik, lebih menonjol pada persoalan-persoalan politik atau penafsiran politik (pers dikenal juga sebagai salah satu infrastruktur politik).

Keberpihakan pers terhadap publik masih lebih menekankan pada pembelaan terhadap hak-hak rakyat yang dipertalikan dengan hak-hak politik, di tengah-

tengah orientasi pada segi politik cq segi-segi kekuasaan yang masih begitu mengkedepan. Ketika pers dihadapkan dengan berbagai tingkah laku dan kenyataan politik yang makin menjauh dari kepentingan rakyat banyak, pers harus berani berperan sebagai *the spearhead*, menerobos berbagai kepincangan atau kebuntuan itu. Sudah saatnya pers benar-benar menempatkan diri sebagai *the fourth estate* untuk mengkedepankan makna sosial nasionalisme, demokrasi, negara hukum, dan hak asasi. Pers mempunyai modal atau kekuatan yang cukup untuk melakukan itu, karena hingga saat ini pers masih menjadi pemegang kartu terbaik kepercayaan rakyat. Jangan sia-siakan kepercayaan dan harapan itu. Tentu saja, agar dapat melakukan tugas mulya itu dengan baik, pers harus benar-benar profesional, senantiasa menjunjung tinggi *the most highly moral standard*, dan berbagai asas serta tata kerja pers yang berkualitas dan bertanggung jawab.

Perpaduan antara menjadi *spearhead* mewujudkan segi-segi sosial nasionalisme, demokrasi, negara hukum, dan hak asasi dengan sikap dan tata kerja profesional, senantiasa menjunjung standar moral tertinggi dengan memenuhi standar-standar jurnalistik yang bermutu, itulah yang disebut “PERS SEHAT” sebagai tema HPN kita: “Pers Sehat Negara Kuat”. Selamat berkontribusi dalam HPN 2015 untuk berjuang mewujudkan perikehidupan rakyat yang sejahtera dan adil.

(Materi Sambutan untuk Buku Hari Pers Nasional 2015)

PENGURUS DEWAN PERS PERIODE 2013-2016:

- **Ketua:** Bagir Manan
- **Wakil Ketua:** Margiono
- **Anggota:** Anthonius Jimmy Silalahi, I Made Ray Karuna Wijaya, Imam Wahyudi, Muhammad Ridlo 'Eisy, Nezar Patria, Ninok Leksono, Yosep Adi Prasetyo
- **Sekretaris (Kepala Sekretariat):** Lumongga Sihombing

REDAKSI ETIKA:

- **Penanggung Jawab:** Bagir Manan
- **Redaksi:** Herutjahjo, Chelsia, Samsuri, Lumongga Sihombing, Ismanto, Dedi M Kholik, Wawan Agus Prasetyo, Reza Andreas (foto).

■ Surat dan Tanggapan Dikirim ke Alamat Redaksi:

Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih 34, Jakarta 10110.
Tel. (021) 3521488, 3504877, 3504874 - 75, Faks. (021) 3452030
Surel: sekretariat@dewanpers.or.id
Twitter: @dewanpers
Laman: www.dewanpers.or.id / www.presscouncil.or.id

(ETIKA dalam format pdf dapat diunduh dari website Dewan Pers: www.dewanpers.or.id)



Selama Januari 2015, Dewan Pers Terima 80 Pengaduan

Aktivitas Pengaduan Pada Bulan Januari 2015

No	Keterangan	Jumlah
1	Surat pengaduan yang diterima Dewan Pers	80 surat
2	Surat yang dikeluarkan Dewan Pers terkait pengaduan	54 surat
3	Pertemuan penyelesaian pengaduan	6 kali
4	Risalah Penyelesaian Pengaduan yang ditandatangani	2 kasus
5	Lima Provinsi terbanyak tempat domisili pengadu	
	• DKI Jakarta	32 surat
	• Sumatera Utara	11 surat
	• Jawa Barat	6 surat
	• Jawa Timur	5 surat
	• Bali	5 surat

Selama Januari 2015, Dewan Pers menerima 80 surat pengaduan. Namun, tidak semua surat pengaduan tersebut bisa ditindaklanjuti, karena tidak terkait dengan karya jurnalistik dan etika pers. Setelah dipelajari, hanya ada 29 surat pengaduan yang merupakan kasus pers yang akan ditindaklanjuti oleh Dewan Pers.

Pada bulan yang sama, Dewan Pers juga telah mengirim 37 surat terkait pengaduan yang ditujukan kepada berbagai pihak. Surat tersebut antara lain dikirim kepada sejumlah perusahaan pers agar

mereka memperhatikan kewajiban melayani hak jawab sesuai Undang-Undang No. 40/1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Menyangkut kasus pers yang segera harus ditindaklanjuti, Dewan Pers telah mengirim 11 undangan kepada pengadu maupun teradu untuk meminta klarifikasi. Sementara dua kasus pers berhasil diselesaikan melalui penandatanganan risalah kesepakatan.

Dari seluruh surat pengaduan yang masuk ke Dewan Pers, ada lima provinsi yang paling sering

muncul dalam pengaduan yaitu DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur dan Bali.

Harian Rakyat Bengkulu

Dewan Pers tidak lagi menangani pengaduan Gubernur Bengkulu, H. Junaidi Hamsyah, terhadap harian *Rakyat Bengkulu*, RB TV, dan *rakyatbengkulu.com*. Hal ini menyusul telah tercapainya kesepakatan antara kedua pihak dalam pertemuan yang mereka gelar di Bengkulu, 8 Januari 2015. Sebelumnya, Gubernur Bengkulu mengadukan ketiga media tersebut karena memuat berita yang dinilai merugikannya.

Di dalam surat Ketua Komisi Pengaduan Dewan Pers, M Ridlo Eisy, nomor 75/DP-K/II/2015, yang ditujukan kepada Gubernur Bengkulu, *Rakyat Bengkulu*, RB TV, dan *rakyatbengkulu.com*, Dewan Pers menyatakan menghargai tercapainya kesepakatan tersebut.

"Dengan demikian, perkara ini selesai serta tidak ditangani lagi oleh Dewan Pers. Meskipun demikian, Dewan Pers mencatat ada pelanggaran Kode Etik Jurnalistik yang dilakukan oleh harian *Rakyat Bengkulu*, RB TV, *rakyatbengkulu.com*. Hal itu hendaknya menjadi perhatian dan evaluasi bagi pengelola *Rakyat Bengkulu*, RB TV, *rakyatbengkulu.com* pada masa yang akan datang," demikian penegasan Dewan Pers. (red)

